

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

DETERMINAN KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA: STUDI KASUS 33 KABUPATEN/KOTA PERIODE 2020-2022

Laila Campaka Wangi¹, Syahda Azmi Syahidah², Estro Dariatno Sihalo³

^{1,2} Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

^{3*} Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

E-mail: laila22001@mail.unpad.ac.id¹⁾

syahdazmi22002@mail.unpad.ac.id²⁾

estro.sihalo@unpad.ac.id^{3*)}

Abstrak

Indonesia telah berkomitmen mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), salah satunya adalah SDG pertama yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan dalam berbagai bentuk. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan kemiskinan, permasalahan ini masih menjadi salah satu fokus pemerintah yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Fenomena kemiskinan di Indonesia juga diperparah oleh rendahnya kualitas tenaga kerja yang mengakibatkan rendahnya produktivitas dan pada akhirnya berdampak pada rendahnya upah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi Kemiskinan pada 33 Kota/Kabupaten di Sumatera Utara pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan analisis data panel yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil regresi menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan pada kemiskinan di 33 kab/kota di Sumatera Utara. Sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan pada kemiskinan di 33 kab/kota di Sumatera Utara.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Abstract

Indonesia has committed to support the Sustainable Development Goals (SDGs) launched by the United Nations (UN), one of which is the first SDG that aims to eliminate poverty in various forms. Although the government has made various efforts to reduce poverty, this problem is still one of the government's focuses that requires continuous handling. The phenomenon of poverty in Indonesia is also exacerbated by the low quality of labor which results in low productivity and ultimately has an impact on low wages. The purpose of this study is to determine the determinants that affect Poverty in 33 Cities/Regencies in North Sumatra in the period 2020 to 2022. This study uses panel data analysis, namely the Fixed Effect Model (FEM). The regression results show that the Open Unemployment Rate and Regency / City Minimum Wage have a positive and significant effect on poverty in 33 districts / cities in North Sumatra. Meanwhile, HDI has a negative and significant effect on poverty in 33 districts/cities in North Sumatra.

Keywords: District/City Minimum Wage, Human Development Index, Number of Poor People, Open Unemployment Rate



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Kemiskinan sendiri merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti pendapatan dan pengangguran, tetapi juga oleh faktor sosial seperti akses terhadap layanan dasar, kondisi geografis, dan lingkungan hidup (Susanto & Windyastuti, 2023). Di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, kemiskinan tidak hanya merefleksikan masalah ekonomi, namun juga menjadi indikator dari kompleksitas struktural dan sosial yang belum terselesaikan. Berdasarkan temuan Rahman, Hakim, dan Syafii (2022), Sumatera Utara merupakan salah satu pusat

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, provinsi ini juga menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup serius, dengan jumlah penduduk miskin yang termasuk tinggi secara nasional.

Secara konseptual, kemiskinan dapat dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi finansial dan nonfinansial. Dimensi finansial tidak hanya merujuk pada rendahnya pendapatan, tetapi juga pada kurangnya kepemilikan aset dan terbatasnya akses terhadap layanan publik. Sementara itu, dimensi non-finansial lebih bersifat psikososial, yang mencakup perasaan tidak berdaya, keterasingan sosial, dan kehilangan harapan (Berliani, 2021). Oleh karena itu, pengukuran dan pemahaman terhadap kemiskinan harus mencakup kedua dimensi tersebut secara komprehensif.

Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan secara signifikan terhadap peningkatan atau penurunan kemiskinan. Di Provinsi Sumatera Utara, beberapa faktor yang patut dipertimbangkan antara lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum memperolehnya. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja, serta adanya pergeseran struktural dalam perekonomian (Romhadhoni et al., 2019). Mankiw (2003) bahkan menyebutkan bahwa pengangguran merupakan salah satu penyebab utama rendahnya kesejahteraan masyarakat karena menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis.

Di sisi lain, IPM merupakan indikator komposit yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat berdasarkan tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (UNDP). IPM berperan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia secara menyeluruh. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh yang kuat terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Utami, 2020; Hasan, 2021; Mahroji & Nurhasanah, 2019). Pemerataan dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan sangat krusial dalam mengurangi kesenjangan pembangunan dan kemiskinan.

Selain itu, UMK menjadi instrumen kebijakan yang digunakan untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah dan meningkatkan daya beli masyarakat. UMK yang memadai dipercaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi tingkat kemiskinan, karena pendapatan yang diterima pekerja lebih mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (Lestari, Nainggolan, & Damanik, 2022). Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa UMK yang terlalu rendah berisiko meningkatkan jumlah rumah tangga miskin, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada upah sebagai sumber pendapatan utama (Susanto & Windyastuti, 2023; Rozi et al., 2019).

Tabel 1. Kemiskinan di Sumatera Utara

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (1000 Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2020	1283.29	8.75
2021	1343.86	9.01
2022	1268.19	8.42

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

Sumber: BPS Sumatera Utara 2023

Tingkat kemiskinan sempat meningkat pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi makro seperti krisis kesehatan global sangat mempengaruhi dinamika kemiskinan, serta memperlihatkan pentingnya kebijakan yang adaptif dan terukur terhadap berbagai variabel yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh masing-masing variabel terhadap kemiskinan, seperti studi oleh Lestari et al. (2022) yang meneliti pengaruh UMK terhadap kemiskinan, serta Romhadhoni et al. (2019) yang menganalisis dampak TPT. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya hanya fokus pada satu atau dua variabel saja, atau tidak mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota secara komprehensif. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel utama tersebut—IPM, TPT, dan UMK—dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di seluruh 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, khususnya pada periode krusial 2020–2022.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IPM, TPT, dan UMK terhadap tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020 hingga 2022. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur sebelumnya dan memberikan kontribusi empiris dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif. Melalui analisis menyeluruh terhadap ketiga variabel tersebut, penelitian ini juga berupaya memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan data cross section dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan data time series selama 3 tahun, dari tahun 2020 hingga 2022. Gujarati (2012) mengemukakan, “penggabungan antara cross section dan time series adalah data panel yang menyediakan lebih banyak informasi dan variasi, mengurangi kolinearitas antar variabel, menawarkan derajat kebebasan yang lebih tinggi, dan lebih efisien.” Model umum data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{kit} + e_{it} \quad \dots(1)$$

dimana: Y_{it} adalah variabel dependen untuk unit individu ke- i dan unit waktu ke- t , X_{kit} adalah variabel independen untuk unit individu ke- i dan unit waktu ke- t , α_{it} adalah koefisien intersep untuk unit individu ke- i dan unit waktu ke- t , dan β_k adalah koefisien kemiringan variabel independen ke- k ; e_{it} adalah error dengan $E(e_{it}) = 0$, $E(e_{it}^2) = \sigma^2$, $E(e_{it}, e_{js}) = 0$ untuk $i \neq j$ dan atau $t \neq s$.

Tabel 2. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Keterangan
---------------------	------------

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

JPM (Y)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
TPT (X1)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
IPM (X2)	Indeks Pembangunan Manusia (%)
UMK (X3)	Upah Minimum Kota (Rp)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Hasil Regresi

		Num of obv.	=	99
		F(3,63)	=	3.57
		Wald chi2(3)	=	57.77
		Prob > chi2	=	0.0000
		R ²	=	0.1453
JPM	Koef.	Robust Std. Err.	z	P > z
TPT (X1)**	836.7762	221.1747	3.78	0.000
IPM (X2)**	-550.6591	248.6433	-2.21	0.027
UMK (X3)**	0.0466593	0.0077686	6.01	0.000
_cons	-61421.91	22755.05	-2.70	0.007

Sumber: Data yang Diolah (STATA17)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan serta solusi yang digunakan dengan metode *Generalized Least Squares* (GLS) untuk menyelesaikan permasalahan asumsi klasik, maka diperoleh hasil regresi pada tabel 7 untuk Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara pada tahun 2020-2022. Model ini menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) pada persamaan (2) sebagai berikut:

$$\hat{y}_{it} = -61421.91 + 836.7762x_{1it} - 550.6591x_{2it} + 0.0466593 x_{3it} \dots(2)$$

Analisis Statistika Deskriptif

Tabel 4. Statistika Deskriptif Berdasarkan Variabel dari Tahun 2020-2022

Var	Obs	Mean	Min	Max	Stdv
JPM (Y)	99	39347.07	4520	193030	34486.72
TPT(X1)	99	5.00404	0.26	11.5	2.81448
IPM (X2)	99	71.20343	61.51	81.76	4.491176

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

UMK (X3)	99	2746279	2499423	3370645	222557.7
-------------	----	---------	---------	---------	----------

Sumber: Data yang Diolah (STATA17)

Tabel 4 menunjukkan statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Jumlah Penduduk Miskin (JPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) selama periode 2020-2022. Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin (JPM) sebanyak 39.347,07 jiwa, dengan jumlah terendah sebanyak 4.520 orang dan jumlah tertinggi sebanyak 193.030 orang. Standar deviasi variabel ini adalah 34.486,72 yang menunjukkan adanya perbedaan yang besar antara jumlah penduduk miskin di berbagai wilayah yang diamati. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rata-rata sebesar 5,00404%, dengan minimum 0,26% dan maksimum 11,5%. Standar deviasi variabel ini adalah 2,81448 yang menunjukkan perubahan sedang pada data observasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata sebesar 71,20343, dengan nilai minimum sebesar 61,51 dan maksimum sebesar 81,76. Standar deviasi variabel ini sebesar 4,491176 yang menunjukkan adanya variasi yang besar antara nilai IPM. Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar Rp2.746.279, dengan minimum Rp2.499.423 dan maksimum Rp3.370.645. Standar deviasi variabel ini adalah 222.557,7 yang menunjukkan perbedaan upah minimum yang besar.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Nilai Variance Inflation Factors (VIF)

Variabel	Keterangan Variabel	VIF
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.43
IPM	Indeks Pembangunan Manusia	1.41
UMK	Upah Minimum Kota/Kab	1.30
	Mean VIF	1.38

Sumber: Data yang Diolah (STATA17)

Semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10, yang mengindikasikan bahwa tidak ada multikolinearitas di antara variabel bebas. Dengan demikian, asumsi multikolinearitas terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Breusch-Pagan digunakan untuk menguji asumsi adanya heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai LM sebesar 20258,10, dan karena $\chi^2(1;0.05) = 7,815$, maka nilai LM lebih besar dari $\chi^2(1;0.05)$. Jika nilai $\text{prob.}>\chi^2$ adalah 0.000 dan $= 0.05$, maka $\text{prob.}>\chi^2=0.000 < \alpha=0.05$. Maka diputuskan untuk menolak H_0 yang mengindikasikan adanya masalah heteroskedastisitas pada model.

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

Uji Autokorelasi

Pengujian asumsi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey. Berdasarkan hasil yang diperoleh, yakni nilai $\text{Prob}>F = 0.3681$ dan $\alpha = 0.05$, maka $\text{Prob}>F=0.000 > \alpha=0.05$. Oleh karena itu, diputuskan gagal menolak H_0 , yang berarti tidak terdapat masalah autokorelasi pada residual model.

Uji Model Terbaik Data Panel (Uji *Hausman*)

Tabel 6. Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq d.f.	Prob.
Cross-section Random	25.19	3	0.0000

Sumber: Data yang Diolah (STATA17)

Berdasarkan uji Hausman diperoleh nilai $\text{Prob.F} = 0.0000$ Karena nilai $\text{Prob.F} < \alpha 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak. Hasilnya, *Fixed Effect Model* (FEM) adalah pilihan yang lebih baik. *Fixed Effect Model* akan digunakan berdasarkan hasil pemilihan model.

Uji Simultan (Uji *F*)

Tabel 5. Hasil Uji Simultan

	<i>Prob. Chi Square (P-Value)</i>
<i>Random Effect Model</i>	0.000

Sumber: Data yang Diolah (STATA17)

Hasil regresi dilakukan uji P-value untuk analisis statistik. Hasil pengujian menghasilkan nilai P-value sebesar 0,0000 dan α sebesar 0,05. Diputuskan untuk menolak hipotesis nol (H_0) karena nilai $\text{P-value}=0.000 < \alpha=0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen secara signifikan dipengaruhi oleh setidaknya satu variabel independen secara simultan.

Uji Parsial (Uji *T*)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial

Variabel	Koefisien	$\text{P}> z $	Kesimpulan
TPT	836.7762	0.000	Signifikan
IPM	-550.6591	0.027	Signifikan

Tabel 7. Hasil Uji Parsial

Variabel	Koefisien	P> z	Kesimpulan
UMK	0.0466593	0.000	Signifikan

Sumber: Data yang Diolah (STATA17)

Uji P-value digunakan untuk analisis statistik. Tabel 5 menyajikan nilai P-value dari setiap variabel serta kesimpulan berdasarkan hasil pengujian.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

Hasil regresi menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara selama 2020–2022. Artinya, semakin tinggi TPT, semakin besar jumlah penduduk miskin karena hilangnya pendapatan membuat kebutuhan dasar sulit dipenuhi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari, Noviarita, dan Devi (2023) di Lampung serta Radani dan Marseto (2024) di Malang, yang sama-sama menunjukkan pengaruh positif TPT terhadap kemiskinan.

Masyarakat dengan pendidikan dan keterampilan rendah cenderung bekerja di sektor informal dengan penghasilan minim, sehingga rentan miskin. Sementara itu, pertumbuhan penduduk yang pesat juga meningkatkan angka pengangguran, di tengah keterbatasan investasi dan dana pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja (Rohmah & Prakoso, 2022).

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Hasil regresi menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara pada periode 2020–2022. Peningkatan IPM, yang mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, secara nyata mampu menurunkan angka kemiskinan karena meningkatkan kapasitas individu dalam mengakses pekerjaan dan memperoleh penghasilan (Daniel et al., 2023).

Temuan ini sejalan dengan Pertiwi dan Purnomo (2022) serta Fahrika et al. (2020), yang menunjukkan bahwa IPM memiliki hubungan terbalik dengan tingkat kemiskinan. Individu dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih baik dan kemampuan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Permana dan Pasaribu (2023) menjelaskan bahwa peningkatan IPM dapat menurunkan kemiskinan melalui tiga saluran utama: harapan hidup yang lebih panjang memungkinkan masyarakat bekerja lebih lama, akses pendidikan yang lebih baik meningkatkan keterampilan dan mobilitas sosial, serta pendapatan per kapita yang lebih tinggi memperkuat daya beli masyarakat. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Azizah dan Asiyah (2023), yang menegaskan bahwa peningkatan IPM berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur.

Pengaruh Upah Minimum Kota/Kab terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara pada periode 2020–2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan UMK justru dapat memperburuk kondisi kemiskinan, salah satunya karena peningkatan UMK

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

berpotensi menurunkan permintaan tenaga kerja, terutama bagi kelompok usia muda dan pekerja yang belum berpengalaman. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rozi et al. (2019) yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum dapat memicu pengangguran dan berdampak negatif terhadap kelompok rentan.

Namun, penelitian Hardana, Nurhalimah, dan Efendi (2022) menyebutkan bahwa UMK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena nilai upah yang ditetapkan masih belum mampu mencukupi kebutuhan dasar masyarakat, seperti yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara itu, penelitian di Kota Makassar menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan, asalkan dibarengi dengan kebijakan pendukung seperti peningkatan cakupan penerima UMK, dorongan partisipasi angkatan kerja, dan subsidi pendidikan tinggi (Ningtyas & Anwar, 2021). Penelitian Romi dan Umiyati (2018) pun menegaskan bahwa kenaikan upah minimum berdampak signifikan terhadap kemiskinan karena pengurangan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain itu, studi oleh Putri et al (2021) juga menunjukkan bahwa secara nasional UMK memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, tetapi tidak signifikan. Ini berarti bahwa meskipun upah minimum naik, hal tersebut belum tentu menurunkan kemiskinan karena nilai upah masih kalah cepat dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup akibat inflasi. Oleh karena itu, dampak UMK terhadap kemiskinan sangat bergantung pada konteks ekonomi daerah dan efektivitas kebijakan pendukung lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variasi tingkat kemiskinan di 33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020-2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu daerah cenderung meningkatkan jumlah individu miskin karena hilangnya sumber pendapatan. Sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengimplikasikan bahwa peningkatan upah minimum-jika tidak disertai dengan kebijakan yang mendukung-dapat mengurangi kesempatan kerja bagi kelompok rentan. Temuan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kemiskinan, yang menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya dibentuk oleh faktor ekonomi secara langsung, tetapi juga oleh kondisi pembangunan manusia dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di daerah.

Penelitian di masa depan disarankan untuk memasukkan variabel tambahan seperti inflasi, pengeluaran sosial, atau ketimpangan pendapatan untuk analisis yang lebih komprehensif. Studi perbandingan di berbagai daerah atau provinsi juga dapat berguna untuk memahami bagaimana dampak upah minimum bervariasi dalam konteks yang berbeda. Karena data saat ini terbatas pada periode pandemi, penggunaan data jangka panjang akan membantu menghasilkan hasil yang lebih stabil. Selain itu, studi di masa depan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan metode campuran untuk menangkap aspek kuantitatif dan kualitatif dari kemiskinan.

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel, H., Purba, N., & Simamora, N. (2023). The Effect of Economic Growth, Open Unemployment Rate and Human Development Index on Poverty in North Sumatra. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(5), 391–402. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i5.4145>
- Ali Hardana, Nurhalimah, N., & Sulaiman Efendi. (2022). Analisis ekonomi makro dan pengaruhnya terhadap kemiskinan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(4), 21–30. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v1i4.370>
- Berliani, K. (2021). Pengaruh tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2020. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 872–882. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2244>
- Daniel, H., Purba, N., & Simamora, N. (2023). The effect of economic growth, open unemployment rate and human development index on poverty in North Sumatra. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(5), 391–402. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i5.4145>
- Dwi Lestari, Nainggolan, P., & Damanik, D. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah, produk domestik regional bruto, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap inflasi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 27–36. <https://doi.org/10.36985/3a9arj33>
- Ezkirianto, R., & Alexandi, M. F. (2018). Analisis keterkaitan antara indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(1), 14–29. <https://doi.org/10.29244/jekp.2.1.2013.14-29>
- Fahrika, A. I., Salam, H., & Buhasyim, M. A. (2020). Effect of human development index (HDI), unemployment, and investment realization towards poverty in South Sulawesi-Indonesia. *The International Journal of Social Sciences World*, 2(2), 110–116.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika* (Terj.). Salemba Empat.
- Hasan, Z. (2021). The effect of economic growth and human development index on poverty in Indonesia. *Journal of Economics and Sustainability*, 3(1), 42–53. <https://doi.org/10.32890/jes2021.3.1.5>
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1).
- Maipita, I. (2018). Simulasi dampak kenaikan upah minimum terhadap tingkat pendapatan dan kemiskinan. *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17(3), 390–410. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i3.347>
- Mankiw, N. G. (2003). *Makro ekonomi* (F. Liza, Terj.). Penerbit Erlangga.
- Meydiasari, D. A., & Soejoto, P. A. (2017). Analisis pengaruh distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap IPM. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen dan Keuangan*, 1(2), November.
- Ningtias, E. N. A., & Anwar, A. F. (2021). Mengukur dampak pengangguran, tingkat pendidikan, upah minimum, dan pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/best.v1i1.1963>

DOI: <https://doi.org/10.24127/jp>

- Nur Azizah, A., & Nur Asiyah, B. (2022). Pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2697–2718. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>
- Permadi, E., & Chrystanto, E. (2021). Analisa pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012–2018. *OECOMICUS Journal of Economics*, 5(2), 86–95. <https://doi.org/10.15642/oje.2021.5.2.86-95>
- Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh inflasi, IPM, UMP dan PDRB terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1113–1132. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3516>
- Pertiwi, E., & Purnomo, D. (2022). Analysis of the effect of gross regional domestic product (GRDP), human development index (IPM), and open unemployment rate (TPT) on poverty rate in Lampung Province. *2nd International Conference on Islamic Economics, Islamic Finance, & Islamic Law (ICIEIFIL)*, 47–61.
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.
- Putria, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 106–114.
- Radani, A. N., & Marseto. (2024). Analysis the effect of economic growth, population, labor force participation rate, and open unemployment rate on poverty rate in Malang Regency. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 3(5).
- Rahman, A., Hakim, S. H., & Syafii, M. (2022). Performance and poverty convergence in North Sumatra. *Economics Development Analysis Journal*, 11(3), 294–304. <https://doi.org/10.15294/edaj.v11i3.57601>
- Rahmaningtyas, V., & Adianita, H. (2023). The effect of open unemployment rate, education level, and labor force on poverty in Indonesia 2018–2022. *International Journal of Economics Development Research*, 4(3), 2044–2054. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v5i1.3581>
- Rohmah, I. S., & Prakoso, J. A. (2022). Pengaruh IPM, RLS, TPT, dan pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 2(6), 255–266. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.294>
- Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4439>
- Sari, I., Noviarita, H., & Devi, Y. (2023). Islamic economic perspective on poverty level: Determination of economic growth, unemployment levels, and minimum wages in Lampung Province. *Advances in Business Research International Journal*, 9(2), 48–63. <https://doi.org/10.24191/abrij.v9i2.23529>